



# LABOR MARKET BRIEF

Muhammad Hanri ([hanri@lpem-feui.org](mailto:hanri@lpem-feui.org))

Nia Kurnia Sholihah ([nia.kurnia@lpem-feui.org](mailto:nia.kurnia@lpem-feui.org))

Photo by Nuno Silva on Unsplash

## RINGKASAN

Pandemi COVID-19 mempengaruhi berbagai indikator dalam aspek sosial dan ekonomi, termasuk ketenagakerjaan di Indonesia. Penurunan jumlah orang yang bekerja diprediksi terjadi akibat adanya disrupsi dari sisi permintaan tenaga kerja karena proyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, beberapa peraturan dan pembatasan aktivitas sebagai upaya untuk pencegahan penularan virus juga membatasi mobilitas pekerja, aktivitas pekerja, dan jam kerja. Tantangan lain yang juga dihadapi oleh pasar tenaga kerja adalah dampak pembatasan tersebut pada pendapatan terutama sektor informal serta risiko naiknya tingkat pengangguran pada kelompok angkatan kerja usia muda.

## KONDISI TENAGA KERJA INDONESIA

Pada Februari 2020, jumlah angkatan kerja tercatat 137,91 juta orang. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebanyak 1,49 persen atau sebesar 2,92 juta orang dibandingkan dengan Februari 2019. Akan tetapi hal ini tidak diiringi dengan peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja yang menurun 0,15 persen poin menjadi sebesar 69,17 persen. Hal ini menunjukkan adanya penurunan pasokan tenaga kerja di Indonesia. Pada periode yang sama, tercatat bahwa penduduk yang bekerja mengalami peningkatan sebesar 1,67 juta orang (1,29 persen) menjadi sebanyak 131,03 juta orang. Pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Februari 2020 lebih tinggi dari proyeksi ILO untuk negara-negara di Asia Tenggara dan Pasifik yaitu sebesar 1,1 persen pada tahun 2020 (ILO, 2020).

Dari total penduduk yang bekerja di Indonesia pada Februari 2020, sebanyak 56,5 persen adalah pekerja dengan status informal. Sebanyak 38,89 persen dari penduduk yang bekerja, pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah SD ke bawah. Penduduk yang bekerja paling banyak berada di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu sebesar 29,04 persen.

Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2020 adalah sebesar 4,99 persen. Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia menunjukkan tren menurun dari Februari 2018 (5,13 persen) sampai dengan Februari 2020. Meskipun mengalami penurunan, tingkat pengangguran terbuka tersebut masih lebih tinggi dari proyeksi ILO untuk negara-negara di Asia Pasifik yaitu sebesar 3,2 persen pada tahun 2020 (ILO, 2020).

Tingkat pengangguran terbuka dari Sekolah Menengah Kejuruan (8,49 persen) merupakan yang paling tinggi dibandingkan

dengan tingkat pendidikan lainnya. Kelompok umur 15-24 tahun juga merupakan kelompok umur dengan tingkat pengangguran terbuka paling tinggi (16,28 persen) dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Provinsi Banten tercatat memiliki tingkat pengangguran terbuka terbesar (8,01 persen) dibandingkan dengan provinsi lainnya dan Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan tingkat pengangguran terbuka paling tinggi (1,16 persen poin) dibandingkan provinsi lainnya pada Februari 2019. Tingkat pengangguran terbuka di perkotaan juga tercatat lebih tinggi (6,15 persen) dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka di pedesaan (3,45 persen). Meskipun karakteristik pekerja di perkotaan merupakan pekerja dengan keterampilan tinggi dan adaptasi teknologi serta arus informasi lebih masif dibandingkan dengan di pedesaan, timpangnya tingkat pengangguran antarwilayah tersebut dimungkinkan sebagai akibat dari tingginya arus urbanisasi pekerja dari pedesaan ke perkotaan (ILO, 2020).

Ketimpangan kondisi tenaga kerja di perkotaan dan pedesaan tidak hanya dicerminkan oleh tingkat pengangguran, tetapi juga ditunjukkan oleh perbedaan upah harian buruh di perkotaan (buruh bangunan) dan pedesaan (buruh tani). BPS (2020) mencatat bahwa secara rata-rata, upah nominal harian buruh tani nasional pada Mei 2020 (Rp55.396) naik sebesar 0,14 persen dibanding upah nominal buruh tani April 2020 (Rp55.318) dan naik sebesar 2,48 persen dibandingkan dengan upah nominal buruh tani pada Mei 2019. Sementara itu, pola berbeda terjadi pada upah riil buruh tani pada Mei 2020 yang meningkat sebesar 0,21 persen dibandingkan dengan upah riil buruh tani April 2020, tetapi menurun sebesar 0,33 persen dibandingkan dengan upah riil buruh

tani pada Mei 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan daya beli dari pendapatan buruh tani pada Mei 2020 dibandingkan dengan kondisi pada tahun sebelumnya.

Di sisi lain, secara rata-rata pada periode yang sama juga terjadi kenaikan upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) yang lebih kecil yaitu sebesar 0,01 persen pada Mei 2020 (Rp89.684) dibanding upah nominal harian buruh bangunan pada

April 2020 (Rp89.675). Akan tetapi, upah riil harian buruh bangunan mengalami penurunan sebesar 0,06 persen pada periode yang sama. Jika dibandingkan dengan upah harian buruh bangunan pada Mei 2019, tercatat bahwa upah nominal naik 1,15 persen dan upah riil turun sebesar 1,02 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa pada Mei 2020, penurunan daya beli pendapatan buruh bangunan lebih besar dibandingkan dengan penurunan daya beli pendapatan buruh tani pada Mei 2019.

	Februari 2019	Februari 2020	
Partisipasi Angkatan Kerja	69,32%	69,17%	▼ 0,15 persen poin
Penduduk yang Bekerja	129,36 juta orang	131,03 juta orang	▲ 1,67%
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,01%	4,99%	▼ 0,02 persen poin
Tingkat Pengangguran Terbuka Lulusan SMK	8,63%	8,49%	▼ 0,14 persen poin
Tingkat Pengangguran Kelompok Umur 15-24 Tahun	15,38%	16,28%	▲ 0,9 persen poin
	Mei 2019	Mei 2020	
Upah Nominal Harian Buruh Tani	54.056 rupiah/ hari	55.396 rupiah/ hari	▲ 2,48%
Upah Riil Harian Buruh Tani	52.496 rupiah/ hari	52.321 rupiah/ hari	▼ 0,33%
Upah Nominal Harian Buruh Bangunan	88.664 rupiah/ hari	89.684 rupiah/ hari	▲ 1,15%
Upah Riil Harian Buruh Bangunan	86.400 rupiah/ hari	85.519 rupiah/ hari	▼ 1,02%



Sumber: BPS (2020)

## DAMPAK COVID-19 PADA DUNIA KERJA

Hingga akhir Juni 2020, WHO menyampaikan bahwa secara global jumlah kasus terkonfirmasi positif di dunia mencapai lebih dari 10 juta orang dengan kematian hampir mencapai 500 ribu jiwa. Pandemi ini menyebabkan guncangan perekonomian global dan pasar tenaga kerja, karena tidak hanya berdampak pada pasokan (produksi

barang dan jasa) tetapi juga permintaan (konsumsi dan investasi). Gangguan pada rantai pasok yang diawali di Asia Timur menyebar ke seluruh dunia sehingga menyebabkan baik usaha besar maupun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengalami penyesuaian operasi bisnis. Akibatnya, terjadi disrupsi dari sisi

permintaan tenaga kerja karena proyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi sebagai dampak adanya pandemi COVID-19. Penundaan rekrutmen pekerja sampai dengan pemutusan hubungan kerja dilakukan sebagai salah satu upaya efisiensi biaya yang dilakukan oleh para pemberi kerja.

Selain gangguan pada proses bisnis, beberapa peraturan seperti larangan bepergian, penutupan seluruh atau sebagian wilayah dan karantina kesehatan, membuat pekerja memiliki keterbatasan untuk dapat berpindah ke tempat kerja atau melakukan pekerjaan mereka. Estimasi ILO menunjukkan bahwa 20 persen pekerja dunia tinggal di negara-negara dengan penutupan tempat kerja yang disyaratkan untuk semua kecuali pekerja yang penting. Di sisi lain, 69 persen pekerja tinggal di negara-negara dengan penutupan tempat kerja yang disyaratkan untuk beberapa sektor atau kategori pekerja, dan 5 persen lainnya tinggal di negara-negara dengan penutupan tempat kerja yang direkomendasikan.

Sementara itu, COVID-19 Community Mobility Report Indonesia menunjukkan bahwa pada bulan Juni 2020 tercatat penurunan rata-rata pergerakan orang di tempat transit kendaraan umum (stasiun, terminal, pelabuhan, dll) sebesar 44,57 persen dibandingkan dengan kondisi *baseline*<sup>1</sup> dan turun sebesar 22 persen di tempat kerja dibandingkan dengan kondisi *baseline*. Penurunan rata-rata pergerakan orang di tempat kerja tertinggi terjadi pada bulan Mei 2020 yang mencapai 34,39 persen. Sedangkan berdasarkan data pada 23 Juni 2020, penurunan pergerakan orang di tempat kerja terjadi paling tinggi terjadi di DKI Jakarta dibandingkan dengan provinsi lainnya, yaitu berkurang sebesar 35 persen dibandingkan dengan kondisi *baseline*.

Lebih jauh lagi, COVID-19 juga berdampak pada perkiraan penurunan aktivitas kerja meskipun pada triwulan pertama tahun 2020 menunjukkan pola yang tidak sama di seluruh berbagai kawasan di dunia. Jumlah jam kerja pada triwulan pertama tahun 2020 di kawasan Asia Pasifik diperkirakan menurun sebesar 6,5 persen di Asia dan Pasifik (didorong oleh penurunan 11,6 persen di Asia Timur) dibandingkan dengan triwulan terakhir tahun 2019, sedangkan wilayah lainnya secara rata-rata mengalami penurunan 3 persen atau kurang pada periode yang sama. Hal ini diperkirakan akibat dari perbedaan penyesuaian pola pasar tenaga kerja yang berkaitan erat dengan waktu pertama kali COVID-19 terkonfirmasi positif dan pembatasan aktivitas fisik mulai diterapkan di kawasan tersebut.

Estimasi ILO untuk triwulan kedua tahun 2020 menunjukkan bahwa secara global, jam kerja menurun sebesar 10,7 persen relatif terhadap triwulan terakhir tahun 2019, yang setara dengan 305 juta pekerjaan penuh waktu (dengan asumsi 48 jam kerja per minggu). Negara-negara di Asia Pasifik mengalami peningkatan penurunan jam kerja dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu menjadi sebesar 10 persen. Penurunan terbesar dialami oleh kelompok negara berpenghasilan tinggi sedangkan kelompok negara berpenghasilan menengah ke bawah seperti Indonesia diperkirakan mengalami penurunan jam kerja sebesar 11,4 persen pada periode yang sama.

Pembatasan pergerakan pekerja ini memiliki efek pada penurunan pendapatan, terutama untuk pekerja informal dan pekerja sambilan. ILO memperkirakan bahwa, dengan asumsi situasi tanpa sumber pendapatan alternatif, kehilangan pendapatan tenaga kerja akan menghasilkan peningkatan kemiskinan relatif

---

<sup>1</sup> Nilai tengah pada periode 3 Januari-6 Juni 2020

untuk pekerja informal dan keluarga mereka lebih dari 21 persen poin di negara-negara berpenghasilan menengah ke atas, hampir 52 persen poin di negara-negara berpenghasilan tinggi dan 56 persen poin di negara-negara berpenghasilan rendah.

Selain itu, ILO juga menekankan pada tantangan yang dihadapi oleh angkatan kerja yang masuk dalam kelompok usia muda (15-24 tahun). Data pada periode sebelum pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa kelompok usia tersebut cenderung tidak memiliki pekerjaan atau bekerja dalam pekerjaan berkualitas rendah dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Pada Februari 2019, tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada usia ini mencapai 15,38 persen, lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran global pada kelompok usia yang sama secara rata-rata pada tahun 2019 (13,6 persen) yang juga lebih tinggi dibandingkan pada masa sebelum krisis keuangan global di tahun 2017 (12,3 persen). ILO mencatat bahwa secara global lebih dari 75 persen dari pekerja pada kelompok usia ini

cenderung bekerja di sektor informal yang rentan terhadap guncangan ekonomi. Sebanyak 46 persen dari kelompok usia muda di Asia dan Pasifik diprediksi bekerja di sektor yang memiliki risiko tinggi terdampak COVID-19.

Krisis yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 memunculkan tantangan bagi tenaga kerja antara lain: (1) pembatasan fisik yang dapat mengurangi jam kerja dan pendapatan; (2) kehilangan pekerjaan saat ini dan/ atau pengurangan hak di tempat kerja; dan (3) munculnya hambatan yang lebih besar untuk menemukan pekerjaan, kembali memasuki pasar tenaga kerja dan mencoba untuk beralih ke pekerjaan yang lebih baik. Oleh karena itu, kerangka kebijakan yang dirumuskan perlu memperhatikan tantangan yang dihadapi oleh tenaga kerja tersebut seperti stimulus ekonomi untuk mendorong permintaan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial, dan peningkatan peluang kerja melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan di masa yang akan datang.



**Pembatasan Wilayah dan Aktifitas**



**Penurunan Jam Kerja**



**TENAGA KERJA DAN COVID-19**

**Tantangan Lainnya**



Pandemi COVID-19 memunculkan tantangan bagi tenaga kerja antara lain:  
 1. Pembatasan fisik yang dapat mengurangi jam kerja dan pendapatan;  
 2. Kehilangan pekerjaan saat ini dan/ atau pengurangan hak di tempat kerja;  
 3. Munculnya hambatan yang lebih besar untuk menemukan pekerjaan, kembali memasuki pasar tenaga kerja dan mencoba untuk beralih ke pekerjaan yang lebih baik.



Sumber: ILO (2020)

## Referensi

- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2020). Berita Resmi Statistik. (15 Juni 2020)
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2020). Berita Resmi Statistik. Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2020. No. 40/05/Th. XXIII, 05 Mei 2020 COVID-19
- Community Mobility Report (2020). Indonesia (23 June 2020)
- International Labour Office. (2020). ILO Brief. COVID-19 Crisis and the Informal Economy: Immediate Responses and Policy Challenges
- International Labour Organization. (2018). *Decent Work and the Sustainable Development Goals: A Guidebook on SDG Labour Market Indicators*.
- International Labour Organization. (2020). World Employment And Social Outlook. In *International Labour Organization*.
- International Labour Office. (2020). ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. First edition. *International Labour Office*, (March).
- International Labour Office. (2020). ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Second edition. *International Labour Office*, (April).
- International Labour Office. (2020). ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Third edition. *International Labour Office*, (April).
- International Labour Office. (2020). ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Fourth edition. *International Labour Office*, (May).